



PEMERINTAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN



BAPPERIDA
BANKA API PERENCANAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



HASNUR CENTRE
Bakti untuk Banua
Bakti untuk Bangsa



HAFECs
Research &
Publication



POLICY BRIEF

Mewujudkan Asta Cita 7: Mengoptimalkan Inovasi Administrasi Publik sebagai Instrumen Perencanaan Pembangunan Berbasis Data dan Integrasi Sistem di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Standardisasi Dokumentasi, Konsolidasi Aplikasi Kewilayahan, dan Interoperabilitas Sistem Informasi Lintas-OPD

Tahun
2026

Tim Peneliti:

1. Junaidy, M.I.Kom M.AB
2. Danang Bagus Yudistira, S.Si., M.Sc.
3. Farida Hayati, S.Pd.
4. Raihani Raziqin, S.Tr.Kom.

Mewujudkan Asta Cita 7: Mengoptimalkan Inovasi Administrasi Publik sebagai Instrumen Perencanaan Pembangunan Berbasis Data dan Integrasi Sistem di Kabupaten Hulu Sungai Selatan *(Standardisasi Dokumentasi, Konsolidasi Aplikasi Kewilayahan, dan Interoperabilitas Sistem Informasi Lintas-OPD)*

Ringkasan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) memiliki portofolio inovasi daerah terbesar pada kategori Asta Cita 7 (Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi), dengan jumlah mencapai 100 inovasi atau 46,7% dari total 214 inovasi daerah. Namun, hasil evaluasi terhadap enam inovasi prioritas—MPP One Stop Smart Service (MOSSS), SILANTING, E-SAKIP, SAPA HSS, Klinik Arsip, dan SIMKuDa—mengindikasikan adanya kesenjangan struktural pada tiga aspek utama: minimnya dokumentasi substansi program, fragmentasi dan duplikasi pengembangan aplikasi antar-kecamatan, serta belum terintegrasinya sistem data lintas-perangkat daerah. Untuk mengawal Asta Cita 7 sekaligus mendukung sinkronisasi RPJMD dan RKPD, dokumen ini merekomendasikan empat langkah strategis: (1) perbaikan dokumentasi dan standar operasional prosedur, (2) konsolidasi platform pelayanan terpadu kecamatan ke standar seragam, (3) pengembangan dashboard pemantauan inovasi terpadu (SIMONEV INOVASI) yang dikelola Bapperida, dan (4) pembentukan Forum Interoperabilitas Data Lintas OPD (FIDO).

Latar Belakang dan Permasalahan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapperida) Kabupaten HSS mengampu fungsi perencanaan pembangunan daerah dan penelitian. Dalam menjalankan fungsinya, Bapperida memerlukan pemetaan komprehensif terhadap inovasi administrasi publik agar dapat disinkronkan secara optimal ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kategori Asta Cita 7, yang secara spesifik mengamankan penguatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, menjadi rumah bagi 100 inovasi kategori terbanyak di antara delapan Asta Cita lainnya.

Meskipun demikian, evaluasi terhadap desain kebijakan dan implementasi inovasi tersebut mengungkap adanya permasalahan mendasar pada dua ranah. Pertama, sebanyak 76% (96 dari 100) inovasi pada perspektif ini hanya tercatat sebagai nama program tanpa uraian substansi dan manfaat yang terdokumentasi secara lengkap dalam basis data rekapitulasi, sehingga penilaian terhadap mutu rancangan dan dampak program menjadi sangat terbatas. Kedua, inovasi pelayanan terpadu satu pintu di tingkat kecamatan tumbuh secara independen tanpa kerangka standar teknis yang seragam, sehingga menimbulkan duplikasi biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, serta kesulitan dalam saling terhubung antar-sistem data lintas-kecamatan.

Data dan Temuan

Berdasarkan hasil evaluasi komprehensif terhadap enam inovasi prioritas pada ranah administrasi publik Kabupaten HSS, teridentifikasi empat temuan utama sebagai berikut:

1. **Krisis Dokumentasi dan Keterbukaan Data:** Dari enam inovasi fokus, SAPA HSS (skor komposit 2,20) dan SIMKuDa (skor 2,80) merupakan inovasi dengan tingkat dokumentasi paling rendah. SAPA HSS tercatat sebagai kanal pengaduan tanpa uraian teknis mengenai mekanisme disposisi dan standar waktu penyelesaian (SLA). Sementara itu, SIMKuDa hanya tercatat sebagai nama program tanpa uraian teknis dalam rekapitulasi, meskipun secara nasional telah terintegrasi dengan sistem Siskeudes. Kondisi ini secara fundamental menghambat akuntabilitas horizontal kepada masyarakat maupun DPRD.
2. **Fragmentasi dan Duplikasi Aplikasi Antar-Kecamatan:** Analisis pada sub-klaster Pelayanan Terpadu Satu Pintu menunjukkan bahwa puluhan kecamatan di Kabupaten HSS mengembangkan aplikasi/sistem pelayanan administratifnya masing-masing secara mandiri, seperti SIAP KADARAT (Daha Barat), SI UTARA (Daha Utara), SIPATIN KECAPANG (Kalumpang), dan SIPOLA (Daha Selatan). Pola inovasi yang terfragmentasi ini, meskipun mencerminkan responsivitas lokal, berisiko menimbulkan duplikasi anggaran pengembangan sistem informasi serta menyulitkan standarisasi layanan dan saling terhubung antar-sistem data antar-kecamatan.
3. **Kesenjangan Interoperabilitas Sistem Data Lintas-OPD:** Meskipun beberapa sistem unggulan seperti E-SAKIP, SILANTING, dan SIMKuDa telah terhubung dengan platform nasional masing-masing (E-Kinerja, SIAK, Siskeudes), belum terdapat mekanisme pertukaran data otomatis antar-sistem tersebut pada level kabupaten. Akibatnya, Bapperida dan OPD terkait masih dihadapkan pada kebutuhan untuk melakukan kompilasi manual data kinerja dari berbagai sistem yang berjalan sendiri-sendiri (silo data), yang berimplikasi pada inefisiensi penyusunan evaluasi RKPD dan RPJMD.
4. **Tingkat Kesiapan Teknis yang Beragam:** E-SAKIP (skor 4,70) dan MOSSS (skor 4,60) terbukti memiliki tingkat kematangan tata kelola dan teknis tertinggi, didukung oleh integrasi penuh antar-sistem perencanaan, keuangan, dan kinerja melalui Single Sign-On (SSO) berbasis biometrik dan geolokasi (E-SAKIP), serta konsolidasi 117 layanan dari 16 instansi dalam satu lokasi fisik MPP (MOSSS). Sebaliknya, SILANTING yang baru menjalani bimbingan teknis pada September 2025 masih berada pada tahap awal penguatan kapasitas aparatur, sehingga data mengenai jumlah pengguna dan tingkat penyelesaian permohonan belum dapat dipublikasikan secara terukur.

Rekomendasi Strategis

Untuk mengatasi kesenjangan struktural tersebut dan menjadikan inovasi administrasi publik sebagai instrumen perencanaan pembangunan yang andal, direkomendasikan empat langkah strategis sebagai berikut.

4.1 Perbaikan Dokumentasi dan Standar Operasional Prosedur

Bapperida diarahkan untuk menginstruksikan seluruh perangkat daerah pengampu inovasi untuk segera melengkapi dokumentasi substansi dan manfaat program dalam platform SENADA PLUS. Secara khusus, SAPA HSS wajib dilengkapi dengan uraian mekanisme kanal pengaduan dan Standar Waktu Penyelesaian (SLA) yang terpublikasi, sedangkan SIMKuDa wajib dilengkapi dengan dokumentasi teknis pengelolaan keuangan desa, untuk mendukung akuntabilitas horizontal dan vertikal.

4.2 Konsolidasi Platform Pelayanan Terpadu Kecamatan ke Standar Seragam

Bapperida bersama Diskominfo diarahkan untuk menginisiasi konsolidasi terhadap puluhan aplikasi pelayanan terpadu yang dikembangkan secara independen oleh kecamatan. Konsolidasi ini tidak dimaksudkan untuk menghapus inovasi lokal, melainkan untuk menetapkan standar teknis minimum yang seragam (meliputi format data, API pertukaran data, dan keamanan sistem) agar aplikasi kecamatan dapat saling terhubung dan terintegrasi dengan sistem kabupaten, sekaligus mengurangi duplikasi anggaran pengembangan dan pemeliharaan di masa mendatang.

4.3 Pengembangan Dashboard SIMONEV INOVASI sebagai Instrumen Bapperida

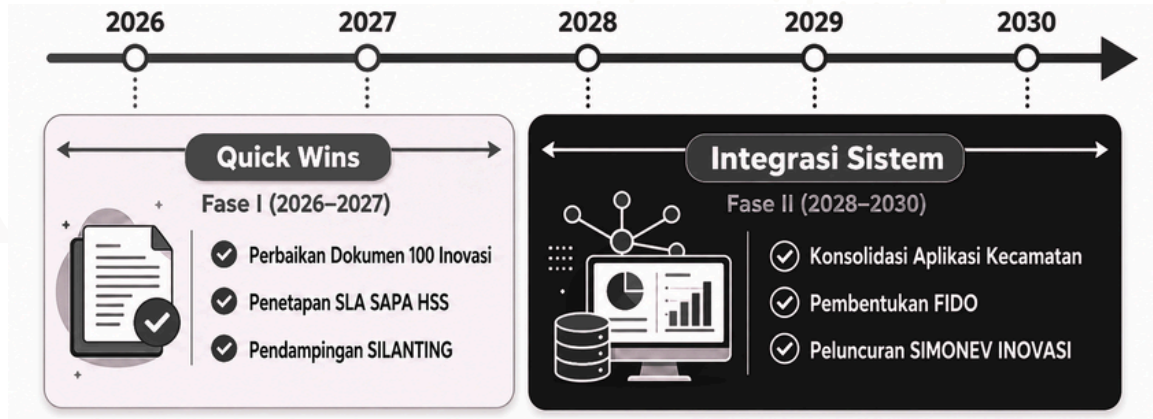
Bapperida direkomendasikan untuk mengembangkan SIMONEV INOVASI (Sistem Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah Terpadu) sebagai dashboard digital yang memantau status aktif, skor tingkat kesiapan, dan keterkaitan terhadap indikator RPJMD/RKPD dari seluruh 214 inovasi daerah, termasuk 100 inovasi pada Asta Cita 7. Dashboard ini akan melengkapi SENADA PLUS dengan lapisan analitik kebijakan yang lebih mendalam, memberikan basis data tunggal bagi Bapperida dalam evaluasi RKPD tahunan, serta mencegah duplikasi pengembangan aplikasi antar-OPD.

4.4 Pembentukan Forum Interoperabilitas Data Lintas OPD (FIDO)

Pemerintah Daerah melalui Bapperida dan Diskominfo diarahkan untuk membentuk FIDO sebagai forum teknis berkala (triwulanan) yang mempertemukan administrator sistem informasi dari seluruh OPD. Forum ini bertugas menyepakati standar pertukaran data (API) lintas-sistem mencakup SIAK, Siskeudes, E-Kinerja, SIKN, dan sistem pelayanan kecamatan—sehingga data yang telah diinput pada satu sistem dapat dimanfaatkan sistem lain tanpa input berulang, meningkatkan akurasi dan kecepatan evaluasi kinerja terintegrasi.

Tahapan Implementasi

Agar rekomendasi dapat diwujudkan secara sistematis, implementasi kebijakan direkomendasikan dilaksanakan dalam dua tahapan.



- Fase I (2026–2027): Standardisasi dan Dokumentasi. Memfokuskan pada langkah berbiaya rendah namun berdampak tinggi: (1) perbaikan dokumentasi dan metadata 100 inovasi, khususnya SAPA HSS dan SIMKuDa; (2) penetapan standar waktu tanggap (SLA) untuk SAPA HSS dan publikasi capaian transparansi APBDes melalui SIMKuDa; (3) pendampingan lanjutan operator SILANTING pasca-Bimtek; serta (4) pemetaan awal kebutuhan saling terhubung antar-sistem data antar enam inovasi fokus.
- Fase II (2028–2030): Integrasi dan Konsolidasi. Memfokuskan pada pengembangan sistem digital terpadu dan konsolidasi aplikasi yang membutuhkan investasi lebih besar: (5) konsolidasi platform aplikasi pelayanan terpadu kecamatan ke standar seragam; (6) pembentukan Forum Interoperabilitas Data Lintas OPD (FIDO); (7) pengembangan dan peluncuran dashboard SIMONEV INOVASI; serta (8) integrasi penuh MOSSS dengan MPP Digital Nasional dan seluruh sistem OPD terkait.

Penutup

Keberhasilan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Kabupaten HSS tidak lagi diukur dari bertambahnya jumlah aplikasi atau inovasi yang diluncurkan, melainkan dari sejauh mana sistem-sistem tersebut terintegrasi, terdokumentasi, dan memberikan basis data yang andal bagi perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten HSS tidak perlu melahirkan inovasi baru dalam jumlah besar di luar yang telah ada, melainkan diarahkan untuk menghubungkan dan menstandarisasi 100 inovasi Asta Cita 7 yang telah ada, menutup celah dokumentasi, serta memastikan data kinerja dapat saling terhubung. Langkah konkret pertama yang paling mendesak adalah menginstruksikan Bapperida untuk segera memetakan kebutuhan infrastruktur data dan memfasilitasi pembentukan FIDO, agar inovasi administrasi publik benar-benar menjadi fondasi perencanaan pembangunan yang berbasis bukti, efisien, dan akuntabel.